

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 21, No. 2, Juni 2016

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	I-II
● PERAN SUMBER DATA TUNGGAL DALAM MENDUKUNG KETEPATAN SASARAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN <i>oleh: Edmira Rivani</i>	87-103
● TANTANGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI MASA DATANG <i>oleh: Juli Panglima Saragih</i>	105-123
● STRATEGI EKSPANSI INTERNASIONAL BADAN USAHA MILIK NEGARA SEKTOR TELEKOMUNIKASI <i>oleh: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi</i>	125-139
● PERLINDUNGAN TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL MASYARAKAT ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) <i>oleh: Sri Nurhayati Qodriyatun</i>	141-159
● LITERASI PASAR MODAL MASYARAKAT INDONESIA <i>oleh: Suparman Zen Kemu</i>	161-175

PENGANTAR REDAKSI

Perkembangan kelimuan yang sangat cepat di tengah dinamika politik dan sosial ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi para ilmuwan untuk menjawab hal-hal yang dipertanyakan dari dinamika dimaksud. Tantangan ini meletakkan sebuah dokumen data dan informasi baik berupa makalah, buku, jurnal, lembaran analisis *policy option* dan sebagainya, sebagai media terbitan untuk *supporting system* terhadap kinerja parlemen menjadi penting. Ini dalam rangka melakukan *up date* terhadap relevansi substansi yang menjadi muatannya. Jurnal Kajian dalam konteks demikian, sangat jelas menghadapi proses belajar cukup panjang terhadap peningkatan daya dukung Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI terhadap kebutuhan informasi anggota DPR-RI. Sebagai Jurnal paling tertua di antara 5 jurnal bidang lainnya di Puslit DPR RI, Jurnal Kajian, selama lebih dari dua dasawarsa sangat kental dengan desakan atas penyajian tulisan-tulisan yang dimuatnya untuk menjawab kebutuhan semacam itu. Diakui, bahwa dalam proses belajar semacam ini, Jurnal Kajian dengan kalangan redaksi yang terlibat di dalamnya, tidak selalu optimal dalam menjawab tantangan perkembangan cepat semacam itu. Sehubungan itu, setiap edisi terbitan selalu menjadi bahan evaluasi bagi Redaksi guna upaya perbaikan kualitas jurnal di edisi-edisi berikutnya.

Dalam edisi kali ini, Juni 2016, Jurnal Kajian memuat beberapa artikel yang mencoba mengkombinasi dua sisi tantangan teoritis keilmuan dan kebutuhan praktis bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan parlemen di atas. Pertama, adalah, tulisan dari Edmira Rivani berjudul “Peran Sumber Data Tunggal Dalam Mendukung Ketepatan Sasaran Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.” Penulis antara lain menilai, bahwa Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) merupakan bagian utama dalam pembangunan Basis Data Terpadu (BDT). Program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat memanfaatkan data ini untuk perencanaan penetapan sasaran penerima manfaat. Secara kelembagaan, basis data ini dapat diakses oleh kementerian/lembaga melalui Unit Penetapan Sasaran untuk penanggulangan kemiskinan di TNP2K. Dengan semakin besarnya implementasi program penanggulangan kemiskinan bersasaran rumah tangga dan individu di Indonesia, penggunaan data kemiskinan mikro, semakin menunjukkan peranannya sebagai alternatif data terbaik yang dapat digunakan oleh pelaksana program bersasaran rumah tangga atau individu, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kedua, tulisan dari Juli Panglima Saragih berjudul “Tantangan Kebijakan Pengembangan Sektor Pertanian Di Masa Datang”. Penulis menilai antara lain, bahwa Kebijakan pertanian sampai saat ini masih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, walaupun masih sulit dicapai. Pada saat pasar dalam negeri bertumbuh dengan meningkatnya permintaan produk pertanian oleh industri pengolahan pangan, maka pemerintah perlu mereformasi kebijakan pertanian untuk mempercepat peningkatan produksi pertanian. Namun percepatan permintaan industri pengolahan pertanian, tidak dapat diimbangi dengan percepatan produksi pertanian. Sehingga, pemerintah melakukan impor produk pertanian termasuk produk pangan.

Selanjutnya, tulisan yang ketiga, adalah berjudul “Strategi Ekspansi Internasional Badan Usaha Milik Negara Sektor Telekomunikasi”, yang ditulis oleh Sahat Aditua Fandhitya Silalahi. Dalam tulisan ini antara lain dinilai, bahwa untuk ekspansi internasional itu sendiri, BUMN Telekomunikasi memiliki beberapa alternatif strategi, yaitu lisensi, aliansi, dan *joint venture*. Strategi lisensi dikombinasikan dengan aliansi merupakan pilihan strategi terbaik ditinjau dari aspek resiko karena strategi ini memiliki resiko terendah sekaligus memberikan kesempatan peningkatan pendapatan bagi BUMN sektor Telekomunikasi.

Adapun tulisan berikutnya, adalah yang ditulis oleh Siti Nurhayati Qodriyatun, yang berjudul “Perlindungan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik”. Dalam tulisan ini, penulis antara lain menilai, bahwa Kebijakan pemerintah melalui peraturan perundangan yang ada belum mengatur secara spesifik terhadap perlindungan pengetahuan tradisional atas pemanfaatan sumber daya genetik. Ketidakjelasan kebijakan tersebut memunculkan kebijakan yang berbeda-beda di setiap daerah. Namun kebijakan yang dibuat di daerah pun belum dapat melindungi pengetahuan tradisional atas pemanfaatan sumber daya genetik yang ada. Oleh karena itu perlu ada kebijakan spesifik terkait pengetahuan tradisional tersebut.

Akhirnya, dalam tulisan kelima yang dimuat oleh Jurnal Kajian edisi ini, adalah yang ditulis oleh Suparman Zen Kemu dengan judul “Literasi Pasar Modal Masyarakat Indonesia”. Dalam tulisan ini antara lain dinilai, bahwa rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal tidak terlepas dari rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap sektor keuangan, dimana pasar modal merupakan sub sektor dari sektor keuangan, bersama dengan sub sektor yang lain seperti perbankan, asuransi, dana pensiun dan

multi finance. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Self Regulatory Organiation* (SRO) seperti halnya Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) perlu terus mensosialisasikan pasar modal sebagai tempat berinvestasi kepada masyarakat. Di samping itu, juga meningkatkan jumlah SDM yang berkualitas untuk meningkatkan kemampuan mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi pasar modal sebagai tempat investasi yang lebih menguntungkan.

Demikianlah kelima karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada Jurnal “Kajian” edisi bulan Juni 2016. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang budiman. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan Jurnal “Kajian” di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, Dr. Ardi Adji dan Dr. Rahmat Hidayat, sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam *Jurnal Kajian* edisi kali ini.

Jakarta, Juni 2016

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Edmira Rivani (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

PERAN SUMBER DATA TUNGGAL DALAM Mendukung Ketepatan Sasaran Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kajian Vol. 21, No. 2, Tahun 2016, hlm. 87-103

Sejak tahun 2009 Indonesia telah memiliki serangkaian program perlindungan sosial sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, khususnya untuk mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin. Namun, ada beberapa masalah yang dihadapi seperti masih rendahnya tingkat ketepatan sasaran program dan komplementaritas antar program dalam menysasar kelompok yang berhak, dalam hal ini masalahnya adalah kelompok sasaran yang seharusnya menerima beberapa program perlindungan sosial sekaligus, ternyata hanya menerima kurang dari yang seharusnya. Oleh karena itu sangat diperlukan unifikasi data sebagai referensi bagi program perlindungan sosial dalam memilih peserta program. Dalam mengatasi hal tersebut TNP2K membangun Basis Data Terpadu (BDT). BDT memberikan hasil penetapan sasaran yang lebih baik. Dampaknya, 10 sampai 30 persen rumah tangga termiskin menerima manfaat lebih besar dari peningkatan cakupan tersebut dibandingkan mereka yang hampir miskin. Selain meningkatkan ketepatan sasaran masing-masing program, BDT juga bertujuan untuk memastikan rumah tangga menerima manfaat-manfaat pelengkap dari beberapa program. Selain itu, BDT mengurangi duplikasi biaya untuk seleksi penerima manfaat dan penargetan yang mencapai 0,5 persen dari belanja pemerintah pusat pada empat program bantuan sosial tingkat nasional (Jamkesmas/JKN, Raskin, BSM dan PKH) pada tahun 2012–2014. Keberadaan BDT merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada yakni meningkatkan kemampuan BDT untuk mengidentifikasi penerima manfaat, meningkatkan efektivitas program dan mempercepat pengurangan kemiskinan. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain adalah pemutakhiran data program yang meliputi pendaftaran dan klasifikasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan membangun sistem penanganan pengaduan.

Kata Kunci: sumber data tunggal, basis data terpadu, penanggulangan kemiskinan, TNP2K, BDT, program bantuan sosial.

TANTANGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI MASA DATANG

Kajian Vol. 21, No. 2, Tahun 2016, hlm. 105-123

Pertanian merupakan salah satu sektor penting penyumbang pertumbuhan ekonomi, dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah—dari masa ke masa mengembangkan sektor pertanian sampai saat ini. Pemberdayaan dan pengembangan pertanian perlu reformasi kebijakan, tidak hanya untuk meningkatkan produksi untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk ekspor. Peningkatan ekspor produk pertanian merupakan salah satu syarat utama menjadi negara pertanian kelas dunia. Kajian deskriptif analisis ini menggunakan metode riset kualitatif, dengan menggunakan data sekunder dari berbagai referensi buku, jurnal, surat kabar, dan berita di internet. Tulisan ini menyimpulkan cita-cita menjadi negara pertanian berkelas dunia dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi pertanian, sehingga menghasilkan surplus neraca pertanian. Pencapaian swasembada pertanian tidak cukup dan perlu upaya mencapai surplus produksi untuk tujuan ekspor agar dapat memperoleh devisa. Oleh karena itu, kebijakan pertanian ke depan tidak hanya fokus pada beberapa komoditas perkebunan saja, tetapi juga perlu peningkatan surplus produksi tanaman pangan, dan komoditas hortikultura di masa datang.

Kata Kunci: pertanian, kebijakan pertanian; komoditas perkebunan, tanaman pangan, hortikultura.

STRATEGI EKSPANSI INTERNASIONAL BADAN USAHA MILIK NEGARA SEKTOR TELEKOMUNIKASI

Kajian Vol. 21, No. 2, Tahun 2016, hlm. 125-139

Globalisasi menuntut perusahaan untuk melakukan ekspansi internasional dalam rangka memenangkan persaingan global. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pengemban tugas memperoleh penerimaan negara, tidak lepas dari tuntutan tersebut. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sektor BUMN yang memiliki potensi dan peluang untuk melakukan ekspansi internasional, mengkaji alternatif strategi, dan mengevaluasi pilihan strategi berdasar resiko terkecil. Analisis menggunakan metode kualitatif, dengan data diperoleh dari buku, jurnal, dokumen resmi, dan sumber dari media daring. Temuan dari kajian ini mendukung argumen bahwa BUMN sektor telekomunikasi merupakan BUMN yang memiliki potensi dan peluang untuk melakukan ekspansi internasional dengan pilihan strategi lisensi- aliansi dan lisensi-joint venture. Sedangkan strategi lisensi-aliansi merupakan strategi dengan tingkat resiko terkecil, yang tetap berpotensi meningkatkan pendapatan BUMN sektor telekomunikasi.

Kata kunci: BUMN, Telekomunikasi, Indonesia, ekspans internasional, lisensi aliansi, lisensi joint venture.

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL MASYARAKAT ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG)

Kajian Vol. 21, No. 2, Tahun 2016, hlm. 141-159

Sumber Daya Genetik (SDG) merupakan bagian dari sumber daya hayati, dan Indonesia kaya akan SDG. Banyak masyarakat Indonesia melalui pengetahuan tradisionalnya melakukan pemanfaatan atas sumber daya genetik, baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun untuk kegiatan ekonomi atau bisnis. Masalahnya, belum ada pengaturan terkait pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik, yang membuat masyarakat lokal ataupun masyarakat adat yang memiliki pengetahuan tradisional tersebut rentan terhadap terjadinya kejahatan biosperacy. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian yang dilakukan di Kabupaten Ende, NTT dan Kabupaten Jayapura, Papua, melihat bahwa upaya perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait hal itu tidak dapat secara optimal dilakukan oleh pemerintah daerah. Ke depan, melalui RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, hal terkait sumber daya genetik dan pemanfaatannya, termasuk pengetahuan tradisional atas pemanfaatan sumber daya genetik, perlu diatur di dalamnya. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional atas pemanfaatan sumber daya genetik dapat dilakukan dengan memberikan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten, dengan menambahkan persyaratan *disclosure requirement* dalam pengajuan paten. Namun, ketentuan ini menuntut Pemerintah untuk melakukan pendataan dan pendaftaran atas pengetahuan tradisional terkait SDG yang ada di masyarakat, selain menetapkan keberadaan masyarakat adat atau masyarakat lokal dengan pengetahuan tradisionalnya tersebut dalam Peraturan Daerah.

Kata kunci: sumber daya genetik, SDG, pengetahuan tradisional, RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1990, HAKI, paten.

LITERASI PASAR MODAL MASYARAKAT INDONESIA

Kajian Vol. 21, No. 2, Tahun 2016, hlm. 161-175

Tujuan kajian ini adalah: (i) Untuk mengkaji seberapa rendah tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal, (ii) Untuk mendiskusikan penyebab rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal, (iii) Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah dibuat dan akan dibuat oleh pemerintah dan otoritas pasar modal. Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan studi pustaka. Sedangkan analisis dilakukan melalui penggunaan tabel, grafik, gambar dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Temuan dari kajian ini adalah: Pertama, tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal sangat rendah bahkan terendah di sektor keuangan sehingga berakibat rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pasar modal. Kedua, penyebab dari rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal adalah: (i) Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa untuk bertransaksi di pasar modal memerlukan modal besar (ratusan juta bahkan miliaran rupiah), (ii) kurangnya pengetahuan teknis mengenai pasar modal, (iii) persepsi masyarakat bahwa transaksi di bursa pasar modal bersifat judi dan mengandung riba dan hukumnya haram, (iv) adanya kejadian-kejadian yang merugikan para investor saham di bursa akibat adanya penipuan yang dilakukan oleh para pialang dimasa lalu menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat bahwa bermain saham di bursa rentan terhadap penipuan, (v) jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organization (SRO) yang belum memadai dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal. Ketiga, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat terhadap pasar modal seperti: (i) trilogi instrumen kebijakan OJK yaitu inklusi keuangan, literasi keuangan (termasuk pasar modal) dan perlindungan konsumen, (ii) kebijakan tiga pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan yakni: literasi keuangan, penguatan infrastruktur literasi keuangan dan pengembangan produk dan jasa keuangan, (iii) penyertaan pemerintah daerah dan institusi non pemerintah dalam melakukan sosialisasi sektor keuangan dan pasar modal kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan lembaga masyarakat non pemerintah lainnya seperti perbankan dan organisasi nir laba.

Kata Kunci: Pasar Modal, Indonesia, Literasi, FSA, SRO.

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Edmira Rivani (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

THE ROLE OF A SINGLE REGISTRY IN SUPPORTING TARGET PRECISION OF POVERTY REDUCTION PROGRAMS

Kajian Vol. 21, No. 2, Tahun 2016, hlm. 87-103

Since 2009 Indonesia has entered a series of social protection programs as one effort to make a prosper life for the people, especially which are poor and vulnerable. But, there are several problems to achieve that goal, such as the low level of accuracy targeting program and complementary between the program in targeting people who is entitled, in this case the problem is the target people who should have received the various social protection programs at once, were actually only receive less than it should. That is why single database is needed as a reference for social protection programs in selecting people to participate in program .In overcame this, TNP2K build Single Data Base (Basis Data Terpadu, BDT). BDT give a better results of targeting the people. The impact, 10 to 30 percent of the poorest receive greater benefit than those people which is not poor. Despite of that, BDT also intended to ensure the target of social protection program receives benefits from some of programs. In addition, BDT reduce the cost for the targeting the people who need a beneficiary, which is reached 0.5 percent of the shopping central government in four social protection national programs (Jamkesmas/JKN, Raskin, BSM, and PKH) in 2012-2014. The existence of BDT is very important. Hence, required sustainability efforts to to overcome the challenges that is improve the ability BDT to identify the target of social protection programs, increase the effectiveness of the program and speed of poverty reduction. Things that can be done to achieve that goals are updating program data whic is including registration and classification, raise public awareness, and establish a complaints handling system.

Keywords: single database, integrated database, poverty alleviation, TNP2K, BDT, social protection program.

CHALLENGES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT POLICY IN THE FUTURE

Kajian Vol. 21, No. 2, Tahun 2016, hlm. 105-123

Agriculture is one of important sectors in contributing economic growth, moreover people welfare in general. From year to year, the government has been demonstrating its efforts in developing agricultural sector. In this relation, agricultural sector needs reform policy in order to meet domestic and international demands, Increasing of production must be realized to create Indonesia as world class agricultural country. This descriptive-analysis paper applies qualitative research method, using information from books, journals, newspapers, internet, and secondary data. This paper concludes that government should introduce reform in agricultural sector to turn Indonesia into world class agricultural country. Self-sufficiency target should be improved with surplus in agricultural production to obtain more foreign exchange. Thus, agriculture policy reform should also support the rising export of non-plantation products into global market in the future.

Keywords: Agriculture, agricultural policy, plantation commodities, food commodities, horticulture.

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

INTERNATIONAL EXPANSION STRATEGIES OF STATE OWNED TELECOMMUNICATION ENTERPRISES

Kajian Vol. 21, No. 2, Tahun 2016, hlm. 125-139

Globalization requires corporations to expand internationally in order to win global competition. State-Owned Enterprises (SOEs) which serve as the state's source of income through their tax and dividend payment also face these challenges. Thus, they need to craft strategies in order to win the global competition. This study aims to analyze the issue in its relations with international expansion opportunities. This study uses qualitative method, in which data is obtained from books, journals, official documents, and internet resources. This study reveals that telecommunications is the most prospective sector for international expansion. The SOE can enter the market using these following strategy alternatives, namely licensing-alliances and licensing-joint venture. Nonetheless, the licensing-alliances strategy contains smaller risk while still able to increase the SOE's revenue.

Keywords: state enterprises, SOEs, telecommunications, Indonesia, international expansions, licensing alliances, licensing joint venture.

PROTECTION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE FOR THE UTILIZATION OF GENETIC RESOURCES

Kajian Vol. 21, No. 2, Tahun 2016, hlm. 141-159

Indonesia is unquestionably one of the world's top biodiversity, and genetic resources is part of the biological resources. Many Indonesian people, using their traditional knowledge, consumes genetic resources, both for their daily needs and also for economic or business activity. Problem remains is the absence of relevant provisions, which makes the local community or indigenous people who have those traditional knowledge is vulnerable from biosperacy threats. Applying a qualitative method, research conducted in Ende, East Nusa Tenggara and Jayapura, Papua, discussing the efforts of local government in protecting genetic resources and those traditional knowledge, which are not optimal. Through the Amending bill of Law No. 5 of 1990 on Conservation of Biological Resources and Ecosystems, the writer suggests that genetic resoures and traditional knowledge need to be consequently regulated. Protection of genetic resources and related traditional knowledge can be conducted by acknowledging intellectual property rights (in the form of patent), with additional disclosure requirements in patent applications. This provision requires the government to make data collection and registration of traditional knowledge on genetic resources in society. In addition to this, it must acknowledge the existence of indigenous peoples or local communities with their traditional knowledge in local regulations.

Keywords: genetic resources, SDG, traditional knowledge, Amandements to the Law No. 5 of 1990, Intellectual Property Rights, Patents.

CAPITAL MARKET LITERATION OF INDONESIAN SOCIETY

Kajian Vol. 21, No. 2, Tahun 2016, hlm. 161-175

The objectives of this study are: (i) to find out how low is the literacy levels of Indonesian society regarding the capital markets, (ii) to examine the causes of low literacy levels, (iii) to determine what policies have been and will be made by the government and capital market authority. Methods of data collection are by using literature as well as other sources. While the analysis is performed by using tables, graphs, images and descriptive qualitative approach. The findings of this study are: First, the level of literacy of society regarding the capital markets is very low and is lowest in the financial sector resulted in low public participation in the capital market. Second, the causes of the low level of community literacy in the capital market are: (i) Most people assume that to trade in the stock market requires a big ammount of capital (hundreds millions or billion of rupiah), (ii) lack of technical knowledge of capital markets, (iii) public perception that the exchange transaction in capital market is a gamble and it contains usury and its Legal is illegitimate (haram), (iv) the existence of the events that harm the investors' shares in the stock due to fraud committed by the brokerages in the past lead to a false perception in the community that play stocks is vulnerable to fraud, (v) the amount and quality of human resources in the Financial Service Authority (FSA) and Self Regulatory Organization (SRO) are inadequate in improving literacy levels of society to capital markets. Third, the government has made some policies in order to improve the literacy of society regarding the capital markets, such as: (i) a FSA trilogy of policy instruments that are financial inclusion, financial literacy (including capital markets), and consumer protection, (ii) the three pillars of the National Strategy for Literacy Financial, namely financial literacy, strengthening of infrastructure for financial literacy, and the development of financial products and services, (iii) the inclusion of local government and non-governmental organization to undergo a socialization of the financial sector and the capital market to the public good that is done by the Indonesian Stock Exchange (BEI), Indonesia's Central Securities Depository (KSEI), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI,) and other non-government community agencies, such as the banking and non-profit organization.

Keywords: capital market, Indonesia, literacy, FSA, SRO.